

LAMPIRAN 1. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA								
1. PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah	1. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda	500	500	-	-	-
		2. Tersusunnya aturan turunan yang menjabarkan dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		3. Tersusunnya program-program perencanaan dan penganggaran PB di Provinsi Kalimantan Tengah yang diterjemahkan dan merujuk dari Perda PB	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		4. Terfasilitasinya upaya percepatan penyusunan peraturan daerah tentang Penanggulangan Bencana di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
	2. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB	1. Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Forum PRB	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Forum PRB	50	250	250	-	-
		2. Adanya Forum PRB yang berkontribusi signifikan terhadap percepatan upaya PRB di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Forum PRB	N/A	N/A	N/A	-	-
		3. Adanya fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas forum PRB di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Forum PRB	N/A	N/A	N/A	-	-
	3. Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan	1. Tersusunnya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo, Bagian Hukum Setda	100	500	500	-	-
		2. Tersusunnya aturan daerah yang memperkuat mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan di daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo, Bagian Hukum Setda	N/A	N/A	N/A	-	-
		3. Terintegrasinya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo, Bagian Hukum Setda	N/A	N/A	N/A	-	-
	4. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana	1. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunjang rencana aksi di 14 Kabupaten/Kota	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda	200	200	-	-	-
		2. Tersusunnya aturan tentang gugus tugas RPB dalam pengarusutamaan dan monev RPB yang melingkupi setiap pemangku kepentingan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Seluruh Institusi Pemda	N/A	N/A	N/A	-	-
		3. Dilaksanakannya fasilitasi sebagai upaya percepatan regulasi perencanaan penanggulangan bencana di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Seluruh Institusi Pemda	N/A	N/A	N/A	-	-
	5. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana	1. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana melalui pencegahan risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang telah ada	Utama: Dinas Agraria dan Tata Ruang Pendukung: Dinas PU, Bappeda, BPBDPK	-	100	100	100	100

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan - 1)	(Lanjutan Aksi - 5)	2. Tersusunnya aturan terkait tata guna lahan dan pendirian bangunan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: Dinas Agraria dan Tata Ruang Pendukung: Dinas PU, Bappeda, BPBDPK	N/A	N/A	N/A	-	-
	6. Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD	1. Adanya Perbaikan BPBD	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, DPRD	-	200	160	100	150
		2. Adanya koordinasi berkala untuk peningkatan kapabilitas dan tata kelola BPBD kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, DPRD		N/A	N/A	N/A	N/A
	7. Penguatan Forum PRB	1. Adanya Dokumen Legalitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya PRB di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Forum PRB	N/A	N/A	N/A	-	-
		2. Adanya mekanisme organisasi Forum PRB Provinsi Kalimantan Tengah beserta tugas dan fungsi masing-masing komponen/struktur, dll sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi Forum PRB	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Forum PRB	N/A	N/A	N/A	-	-
		3. Dilakukannya Fasilitasi dan Pengembangan Lembaga Forum PRB Provinsi Kalimantan Tengah dan Forum PRB 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Forum PRB	0	350	350	350	-
	8. Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah	1. Adanya diskusi reguler dengan DPRD dalam perencanaan dan kegiatan PRB di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: Sekretariat DPRD Pendukung: BPBDPK, Bappeda	100	150	150	150	150
		2. Adanya 70% perencanaan penganggaran terkait PRB di Provinsi Kalimantan Tengah yang disahkan oleh DPRD	Utama: Sekretariat DPRD Pendukung: BPBDPK, Bappeda	N/A	N/A	N/A	-	-
		3. Berjalannya secara optimal fungsi pengawasan Legislatif dalam pengurangan risiko bencana di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: Sekretariat DPRD Pendukung: BPBDPK, Bappeda	N/A	N/A	N/A	-	-
2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	9. Review Peta Bahaya Provinsi Kalimantan Tengah	1. Terlaksananya review peta bahaya dengan melibatkan instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	N/A	N/A	N/A	-	-
		2. Review Kajian Risiko Bencana terkait pengkajian ancaman bencana di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	500	100	500	500	500
		3. Tersusunnya Profil Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200	100	200	200	200
		4. Adanya Pelatihan Penyusunan Peta Risiko Bencana yang melibatkan stakeholder terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	100	350	-	350
		5. Dilakukannya Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana Provinsi Kalimantan Tengah ke 14 kabupaten/kota	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	100	300	300	300

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan - 2)	10. Review Peta Kerentanan Provinsi Kalimantan Tengah	1. Terlaksananya review peta kerentanan dengan melibatkan instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinsos, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	N/A	N/A	N/A	-	-
		2. Review Kajian Risiko Bencana terkait pengkajian kerentanan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinsos, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	500	550	550	600	600
		3. Tersusunnya Peta Kajian Risiko Bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinsos, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100	150	150	100	100
		4. Dilakukannya evaluasi terhadap peta risiko bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinsos, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50	50	50	50	50
	11. Review Peta Kapasitas Provinsi Kalimantan Tengah	1. Terlaksananya review peta kapasitas dengan melibatkan instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinsos, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	N/A	N/A	N/A	-	-
		2. Dilakukannya kaji ulang Penilaian Kapasitas lokal dalam Pengurangan Risiko Bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinsos, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	250	250	250	250	250
		3. Tersusunnya Profil Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinsos, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	170	170	-	-	-
		4. Tersusunnya Kajian Risiko Bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinsos, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	500	0	-	-	-
	12. Penerapan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah	1. Tersusunnya mekanisme pengelolaan penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan RPB yang diperkuat dengan aturan daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		2. Tersusunnya Rencana Aksi Penanggulangan Bencana	Utama: Bappeda Pendukung: BPBDPK Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinsos, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	250	-	-	-	-
		3. Review Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: Bappeda Pendukung: BPBDPK Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinsos, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	250	-	-	-	-

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	13. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah	1. Adanya pembaruan dan pengolahan data-data informasi bencana Provinsi Kalimantan Tengah secara periodik dengan melibatkan 14 kabupaten/kota	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo	-	N/A *	N/A *	N/A *	-
		2. Digunakannya informasi kebencanaan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo	-	N/A *	N/A *	N/A *	-
		3. Dilakukannya Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo, Media dan organisasi radio amatir	200	200	200	-	-
		4. Adanya Brosur dan Penggandaan Peraturan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo, Media dan organisasi radio amatir	150	150	150	50	-
		5. Dilakukannya Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kearifan Lokal dengan melibatkan 14 kabupaten/kota	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo, Media dan organisasi radio amatir	-	-	-	150	150
	14. Membangun Kemandirian Informasi untuk Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat	1. Dilakukannya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di setiap Kabupaten/Kota dengan menggunakan materi yang terstandar di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, Diskominfo, Media dan organisasi radio amatir	350	350	400	50	50
		2. Dilakukannya penyuluhan mitigasi bencana kebakaran dan bencana Lainnya	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, Diskominfo, Media dan organisasi radio amatir	200	200	200	200	200
		3. Terbangunnya perilaku dan budaya masyarakat untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo	-	N/A *	N/A *	N/A *	-
	15. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi Bencana Lintas Lembaga	1. Adanya mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi- guna data dan informasi kebencanaan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo	-	N/A *	N/A *	N/A *	-
		2. Adanya aturan dan sumberdaya yang memadai untuk mendukung mekanisme bersama dalam menjalankan peran bagi guna data dan informasi kebencanaan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo	-	N/A *	N/A *	N/A *	-
		3. Adanya pemanfaatan hasil mekanisme bersama dalam menjalankan peran bagi guna data dan informasi kebencanaan oleh masing-masing stakeholder	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo	-	N/A *	N/A *	N/A *	-
		4. Terfasilitasinya Lembaga Usaha dalam penyusunan Bussines Continues Plan (BCP) dan Penggunaan Corporate Social Responbility (CSR) dalam Penanggulangan Bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo	-	200	300	-	-
	16. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana	1. Adanya peralatan yang memadai yang mendukung Pusdalpos atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo, Media dan organisasi radio amatir	-	N/A	N/A	N/A	-
		2. Berfungsinya secara efektif Pusdalpos dalam penanganan masa krisis di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo	-	N/A	N/A	N/A	-
		3. Dilakukannya Pengembangan Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo	200	300	1.000	200	200
		4. Dilakukannya Pelatihan Pusdalops (officer & staff)	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo	100	150	50	150	50

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan - 3)	(Lanjutan Aksi - 16)	5. Dilakukannya pengembangan Pusdalops/Pusdatin di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo	200	200	250	300	360
	17. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	1. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional dan sistem pendataan bencana di kabupaten/kota	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo	-	N/A	N/A	N/A	-
		2. Adanya proses saling memanfaatkan antara sistem pendataan di tingkat nasional dan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo	-	N/A	N/A	N/A	-
		3. Adanya sistem pendataan nasional yang terintegrasi dengan sistem di daerah yang digunakan untuk ikut membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo	-	N/A	N/A	N/A	-
		4. Diperkuatnya sistem informasi Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah yang terkoneksi dengan Pusdalops di kabupaten/kota	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Diskominfo	25	50	75	100	-
	18. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB	1. Adanya peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB yang dilakukan secara rutin/ berkala di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, TNI, Polri	-	-	-	N/A	N/A *
		2. Diuji cobanya Peralatan PB dalam sebuah latihan kesiapsiagaan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, TNI, Polri	-	-	-	N/A	N/A *
		3. Adanya personil yang mampu merespon kejadian bencana di daerah sesuai dengan SKTD dan sertifikasi penggunaan peralatan PB yang ada	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, TNI, Polri	-	-	-	N/A	N/A *
		4. Adanya Pelatihan Personil Penanggulangan Bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, TNI, Polri	500	500	500	500	500
		5. Dilakukannya pembentukan dan pembinaan TRC PB Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, TNI, Polri	300	300	300	300	300
		6. Dilakukannya pelatihan teknis pengkajian kebutuhan pasca bencana JITU-PASNA dengan melibatkan 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, TNI, Polri	200	200	300	250	250
		7. Dilakukannya peningkatan standar kualifikasi bagi aparaturnya pemadam kebakaran	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, TNI, Polri	100	150	200	250	300
		8. Terlaksananya pelatihan dan penyelamatan kebakaran pada bangunan gedung tinggi	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, TNI, Polri	-	-	150	250	250
		9. Dilakukannya pembinaan dan pelatihan anggota SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran)	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, TNI, Polri	200	200	400	450	600
		10. Terlaksananya pelatihan bersama dan apel siaga pemadam kebakaran	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, TNI, Polri	150	150	150	150	150
		11. Difasilitasi upaya mempercepat pembentukan dan pembinaan TRC PB yang tersertifikasi di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, TNI, Polri					
	19. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	1. Dilakukannya latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem) yang melibatkan 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, TNI, Polri	-	-	-	N/A	N/A *
		2. Terciptanya kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku tentang pentingnya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, TNI, Polri	-	-	-	N/A	N/A *

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan - 3)	(Lanjutan Aksi - 19)	3. Dilakukannya simulasi dan peningkatan keterampilan aparat penanggulangan bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, TNI, Polri	150	175	200	250	250
		4. Dilakukannya apel kesiapsiagaan yang melibatkan 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, TNI, Polri	200	200	200	200	200
	20. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah	1. Dilakukannya analisis kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di daerah untuk memberikan dukungan efektivitas operasi kedaruratan bencana di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	100	100	100	100	100
		2. Dilakukannya pengkajian kebutuhan peralatan dan logistik yang tersinkronisasi dengan Rencana kontijensi atau dokumen kajian lainnya (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) untuk bencana prioritas di daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		3. Adanya integrasi hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik dengan Dokumen Perencanaan Daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		4. Adanya kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan logistik antar instansi Dinas Sosial, TNI, Polri, Tagana, dll	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	300	300	300	300	300
	21. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah	1. Dilakukannya pengadaan pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan sesuai dengan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	300	300	350	500	500
		2. Dilakukannya Pengadaan dan Pengelolaan peralatan kebencanaan sesuai dengan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	250	250	250	250	250
		3. Dilakukannya Pengadaan suku cadang operasional pemadam kebakaran	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	50	75	150	150	200
		4. Dilakukannya Pengadaan Peralatan Operasional Pemadam Kebakaran	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	50	50	75	100	100
		5. Dilakukannya pengadaan perlengkapan keselamatan kerja petugas pemadam kebakaran (APD)	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	50	50	75	100	100
		6. Dilakukannya pengadaan peralatan sistem proteksi kebakaran	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	200	350	500	500	700
		7. Dilakukannya pengadaan mobil pemadam kebakaran	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	-	-	2000	2000	-
	22. Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah	1. Adanya lembaga teknis tertentu di pemerintahan yang membawahi tempat penyimpanan/pegudangan logistik untuk penanganan darurat bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		2. Terjaminnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan tempat penyimpanan/pegudangan logistik PB	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		3. Adanya pendistribusian peralatan PB	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	100	100	100	100	100
	23. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik	1. Adanya lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain logistik</i> yang diselenggarakan secara periodik	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	N/A *	N/A *	N/A *	-	-

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan - 3)	(Lanjutan Aksi – 23)	2. Terpenuhinya sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani dukungan pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		3. Dilakukannya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan <i>supply chain</i> pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/ atau hasil rencana evakuasi	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		4. Adanya Pengadaan suku cadang operasional pemadam kebakaran	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinsos, TNI, Polri	50	75	150	150	200
	24. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana	1. Adanya lembaga di pemerintahan yang menangani dukungan penyediaan cadangan listrik untuk penanganan darurat bencana	Utama: PLN Pendukung: BPBDPK, TNI, Polri, Satpol PP	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		2. Adanya mekanisme dan prosedur daerah dalam menangani dukungan pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah	Utama: PLN Pendukung: BPBDPK, TNI, Polri, Satpol PP	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		3. Adanya strategi/mechanisme daerah dalam memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat di 14 kabupaten/kota dengan mempertimbangkan skenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	Utama: PLN Pendukung: BPBDPK, TNI, Polri, Satpol PP	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
	25. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana	1. Adanya strategi dukungan pemenuhan kebutuhan pangan di 14 kabupaten/kota yang mempertimbangkan skenario bencana terparah (berdasarkan Rencana Kontijensi) dan skenario bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) di daerah, serta dibangun berdasarkan proyeksi iklim daerah	Utama: Dinsos Pendukung: Dinas Pertanian, Bulog, BPBDPK	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		2. Adanya strategi daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat yang disusun bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah	Utama: Dinsos Pendukung: Dinas Pertanian, Bulog, BPBDPK	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		3. Dilakukannya monitoring dan evaluasi pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan	Utama: Dinsos Pendukung: Dinas Pertanian, Bulog, BPBDPK	75	100	150	200	200
4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	26. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana	1. Tersusunnya RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis penanggulangan bencana/manajemen risiko bencana	Utama: Dinas Agraria dan Tata Ruang Pendukung: Dinas PU, Bappeda, BPBDPK	-	-	250	250	250
		2. Difasilitasinya upaya percepatan penyusunan RTRW berbasis penanggulangan bencana/manajemen risiko bencana di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: Dinas Agraria dan Tata Ruang Pendukung: Dinas PU, Bappeda, BPBDPK	-	-	500	500	500
		3. Terintegrasinya RTRW daerah dengan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana	Utama: Dinas Agraria dan Tata Ruang Pendukung: Dinas PU, Bappeda, BPBDPK	-	-	-	N/A	N/A *
	27. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	1. Adanya website RTRW yang mudah diakses oleh publik	Utama: Dinas Agraria dan Tata Ruang Pendukung: Dinas PU, Bappeda, BPBDPK	-	-	-	100	200
		2. Adanya papan Informasi RTRW	Utama: Dinas Agraria dan Tata Ruang Pendukung: Dinas PU, Bappeda, BPBDPK	-	140	140	-	-
		3. Adanya pemanfaatan informasi penataan ruang untuk mengurangi risiko bencana	Utama: Dinas Agraria dan Tata Ruang Pendukung: Dinas PU, Bappeda, BPBDPK	-	-	-	N/A *	N/A *

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan - 4)	28. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	1. Terlaksananya sosialisasi kebencanaan kepada seluruh sekolah/ madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana	Utama: Dinas Pendidikan Pendukung: BPBDPK, Universitas	-	-	-	N/A *	N/A *
		2. Dilaksanakannya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana bagi seluruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana	Utama: Dinas Pendidikan Pendukung: BPBDPK, Universitas	-	-	-	N/A *	N/A *
		3. Dilaksanakannya percontohan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) yang difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana	Utama: Dinas Pendidikan Pendukung: BPBDPK, Universitas	100	100	100	100	100
		4. Dilakukannya pengembangan budaya sadar bencana	Utama: Dinas Pendidikan Pendukung: BPBDPK, Universitas	100	100	100	100	100
		5. Dilakukannya pengembangan Sekolah Aman Asap (Ruang Oksigen) di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: Dinas Pendidikan Pendukung: BPBDPK, Universitas	250	250	250	250	250
	29. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	1. Terlaksananya sosialisasi rumah sakit aman bencana	Utama: Dinkes Pendukung: RSUD, BPBDPK, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang	N/A	N/A	-	-	-
		2. Adanya perencanaan program dan kegiatan di Rumah Sakit yang berada di daerah rawan bencana yang mengadaptasi 4 modul <i>safety hospital</i> (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana).	Utama: Dinkes Pendukung: RSUD, BPBDPK, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang	N/A	N/A	-	-	-
		3. Diterapkannya 4 modul <i>safety hospital</i> (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) oleh Rumah Sakit yang berada di daerah rawan bencana	Utama: Dinkes Pendukung: RSUD, BPBDPK, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang	N/A	N/A	-	-	-
		4. Dilakukannya pengembangan Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	Utama: Dinkes Pendukung: RSUD, BPBDPK, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang	100	300	500	500	500
		5. Dilakukannya pelatihan tenaga medis dan dokter di setiap RSAB	Utama: Dinkes Pendukung: RSUD, BPBDPK, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang	100	100	100	100	100
	30. Replikasi Mandiri Destana ke Desa Tetangga	1. Dilakukannya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan tangguh bencana di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: BPM, Dinsos, Dinkes, NGO, Masyarakat	200	250	300	450	500
		2. Terciptanya kader fasilitator Desa Tangguh Bencana di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai upaya mempercepat replikasi Desa Tangguh Bencana di daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: BPM, Dinsos, Dinkes, NGO, Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	31. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	1. Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang penerapan sumur resapan dan/atau biopori yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	-	-	-	N/A	N/A *

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan - 5)	(Lanjutan Aksi - 31)	2. Adanya penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Dinas Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	-	-	-	N/A	N/A *
		3. Adanya kajian untuk menilai efektifitas penerapan sumur resapan dan/atau biopori di daerah dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	-	-	-	N/A	N/A *
		4. Adanya perencanaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan daerah rawan bencana	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	100	100	100	100	100
	32. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air	1. Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang perlindungan daerah tangkapan air yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	-	-	-	N/A	N/A *
		2. Adanya penerapan perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Dinas Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	200	200	200	200	200
		3. Adanya kajian untuk menilai efektifitas penerapan perlindungan daerah tanggapan air dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	-	-	-	N/A	N/A *
		4. Dilakukannya kegiatan perlindungan wilayah dan masyarakat	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Satpol PP	200	200	200	200	200
		5. Dilakukannya kegiatan penghijauan dalam upaya pengurangan frekuensi dan luasan banjir	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	200	200	200	200	200
	33. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai	1. Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang restorasi sungai yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	-	-	-	N/A	N/A *
		2. Adanya upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Dinas Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	250	250	250	250	250

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan - 5)	(Lanjutan Aksi - 33)	3. Adanya kajian untuk menilai efektifitas kegiatan restorasi sungai dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Satpol PP	-	-	-	N/A	N/A *
	34. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng	1. Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang penguatan lereng yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	-	-	-	N/A	N/A *
		2. Adanya upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Dinas Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	-	-	250	300	-
		3. Adanya kajian untuk menilai efektifitas kegiatan penguatan lereng dalam menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor dalam setahun terakhir	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Satpol PP				N/A	N/A *
		4. Dilakukannya evaluasi/asesment terhadap lereng-lereng rawan longsor	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBDPK, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	100	150	-	-	-
	35. Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan	1. Adanya Kajian Akademis dan Peraturan Daerah tentang budidaya lahan gambut dan konversi lahan gambut	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: BRG, Bappeda, BPBDPK, Bagian Hukum Setda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang	-	-	-	N/A	N/A *
		2. Adanya pengawasan berkala kepada masyarakat, swasta dan instansi yang melanggar Perda budidaya lahan gambut dan konversi lahan gambut	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: BRG, Bappeda, BPBDPK, Bagian Hukum Setda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang	-	-	-	N/A	N/A *
		3. Adanya aturan tentang pengendalian pembukaan lahan tanpa bakar di daerah	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: BRG, Bappeda, BPBDPK, Bagian Hukum Setda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang	-	-	-	N/A	N/A *
		4. Terlaksananya sosialisasi Gakum PB (BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Kehutanan dll)	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: BRG, Bappeda, BPBDPK, Bagian Hukum Setda, Dinas PPU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Manggala Agni/PPI, TNI, Polri	500	500	500	500	500
		5. Adanya Gakum (Polri)	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: BRG, Bappeda, BPBDPK, Bagian Hukum Setda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, TNI, Polri	250	250	250	250	250

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan - 5)	(Lanjutan Aksi - 35)	6. Dilakukannya Patroli Bersama sebagai upaya pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: BRG, Bappeda, BPBDPK, Dinas Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bagian Hukum Setda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, TNI, Polri	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36. Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	1. Adanya Perda yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Satpol PP	-	-	-	N/A	N/A *
		2. Adanya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Satpol PP	-	-	-	N/A	N/A *
		3. Adanya embung dan sumur bor di daerah berisiko kekeringan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Dinas Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satpol PP	500	500	500	500	500
	37. Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang	1. Adanya kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kab	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Satpol PP	-	-	-	N/A	N/A *
		2. Adanya kebijakan kerjasama para pihak dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan landskap	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Satpol PP	-	-	-	N/A	N/A *
		3. Dilakukannya pemantauan hulu DAS di 9 (sembilan) sungai yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Dinas Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satpol PP	300	300	-	-	-
	38. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB	1. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Bangunan Tahan Gempabumi di daerah	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Satpol PP	-	-	200	-	-
		2. Diterapkannya aturan bangunan tahan gempabumi dalam pelaksanaan IMB di daerah	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Satpol PP	-	-	-	N/A	N/A *
		3. Adanya pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan IMB bangunan tahan gempabumi	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Dinas Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satpol PP	-	-	-	N/A	N/A *
	39. Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir	1. Adanya rancangan dan/atau kegiatan awal mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di daerah	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	-	-	-	N/A	N/A *

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan - 5)	(Lanjutan Aksi - 39)	2. Adanya aturan yang mendukung mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di daerah	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	-	-	-	N/A	N/A *
		3. Adanya upaya mitigasi struktural bencana banjir melalui revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Dinas Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	1500	1500	1500	1500	1500
		4. Dilakukannya evaluasi/asesment terhadap tanggul, embung, waduk dan taman kota	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Dinas Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	250	250	-	-	-
	40. Restorasi lahan gambut di daerah berisiko Kebakaran Hutan dan Lahan	1. Tersusunnya master plan pengelolaan gambut dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 kabupaten/kota	Utama: BRG Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappeda, BPBDPK, Bagian Hukum Setda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Dilakukannya kegiatan awal pengelolaan dan restorasi lahan gambut melalui pembuatan Sekat Kanal (bersama BRG dll)	Utama: BRG Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappeda, BPBDPK, Bagian Hukum Setda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		3. Dilakukannya kegiatan awal pengelolaan dan restorasi lahan gambut melalui Pembuatan Sumur Bor (Bersama BRG)	Utama: BRG Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappeda, BPBDPK, Bagian Hukum Setda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		4. Ada kebijakan tentang restorasi lahan gambut di daerah	Utama: BRG Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappeda, BPBDPK, Bagian Hukum Setda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang	-	-	-	N/A	N/A *
		5. Dilakukannya sosialisasi dan revitalisasi lahan gambut	Utama: BRG Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappeda, BPBDPK, Bagian Hukum Setda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6. Dilakukannya evaluasi bersama terhadap lahan gambut di daerah berisiko kebakaran hutan dan lahan	Utama: BRG Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappeda, BPBDPK, Dinas Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bagian Hukum Setda, Dinas PU, Dinas Agraria dan Tata Ruang	200	200	200	200	200

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan - 5)	41. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir Bandang melalui konservasi vegetatif DAS	1. Adanya konservasi vegetatif DAS di daerah	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Dinas Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	-	-	-	N/A	N/A *
		2. Ada kebijakan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor daerah	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	-	-	-	N/A	N/A *
		3. Ada program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawa longsor secara berkelanjutan	Utama: Dinas PU Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, BPBDPK, Satpol PP, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	-	-	-	N/A	N/A *
6.A PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	42. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Gempabumi yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Gempabumi atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Gempabumi	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	300	300	300	-	-
		2. Terlaksananya ujicoba Rencana Kontijensi Bencana Gempabumi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
	43. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Banjir yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Banjir atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Banjir	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	300	300	300	-	-
		2. Terlaksananya ujicoba Rencana Kontijensi Bencana Banjir yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
	44. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah	1. Adanya rancangan dan/atau kegiatan awal yang telah dilakukan untuk membangun sistem peringatan dini banjir di daerah	Utama: Dinas PU Pendukung: BPBDPK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir secara berkala oleh multi stakeholder	Utama: Dinas PU Pendukung: BPBDPK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		3. Meningkatnya sensitivitas masyarakat akan upaya penyelamatan diri secara mandiri dari bencana banjir	Utama: Dinas PU Pendukung: BPBDPK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan – 6A)	(Lanjutan Aksi - 44)	4. Dilakukannya pengorganisasian sistem peringatan dini bencana banjir di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: Dinas PU Pendukung: BPBDPK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	150	150	-	-	-
		45. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tanah Longsor	-	-	-	100	100
		2. Terlaksananya ujicoba Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
	46. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah	1. Adanya rancangan dan/atau kegiatan awal untuk membangun sistem peringatan dini tanah longsor di daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini tanah longsor secara berkala oleh multi stakeholder di daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		3. Meningkatnya sensitivitas masyarakat akan upaya penyelamatan diri secara mandiri dari bencana tanah longsor	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		4. Dilakukannya pengorganisasian sistem peringatan dini bencana tanah longsor di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	-	-	-	150	150
	47. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	300	300	300	-	-
		2. Terlaksananya ujicoba Rencana Kontijensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
	48. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah	1. Adanya rancangan awal untuk membangun sistem peringatan dini Kebakaran Lahan dan Hutan di daerah	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: BPBDPK, Bappeda, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan secara berkala oleh multi stakeholder	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: BPBDPK, Bappeda, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan – 6A)	(Lanjutan Aksi - 48)	3. Meningkatnya sensitivitas masyarakat akan upaya penyelamatan diri secara mandiri dari bencana kebakaran hutan dan lahan	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: BPBDPK, Bappeda, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		4. Dilakukannya pengorganisasian sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendukung: BPBDPK, Bappeda, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	300	300	300	-	-
	49. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Kekeringan yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Kekeringan atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kekeringan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	50	50	50	-	-
		2. Terlaksananya ujicoba Rencana Kontijensi Bencana Kekeringan yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
	50. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah	1. Adanya rancangan untuk membangun sistem peringatan dini Kekeringan di daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder di daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		3. Meningkatnya sensitivitas masyarakat akan upaya penyelamatan diri secara mandiri dari bencana kekeringan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		4. Dilakukannya pengorganisasian sistem peringatan dini bencana kekeringan di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	50	50	50	-	-
	51. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Banjir Bandang yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Banjir Bandang	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	200	200	200	-	-
		2. Terlaksananya ujicoba Rencana Kontijensi Bencana Banjir Bandang yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
	52. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah	1. Adanya rancangan awal untuk membangun sistem peringatan dini banjir bandang di daerah	Utama: Dinas PU Pendukung: BPBDPK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan – 6A)	(Lanjutan Aksi - 52)	2. Adanya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir bandang secara berkala oleh multi stakeholder	Utama: Dinas PU Pendukung: BPBDPK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		3. Meningkatnya sensitivitas masyarakat akan upaya penyelamatan diri secara mandiri dari bencana banjir bandang	Utama: Dinas PU Pendukung: BPBDPK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	N/A *	N/A *	N/A *	-	-
		4. Dilakukannya pengorganisasian sistem peringatan dini bencana banjir bandang di Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: Dinas PU Pendukung: BPBDPK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Agraria dan Tata Ruang, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	200	200	200	-	-
PROGRAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA								
6.B PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	53. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana	1. Adanya mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		2. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang penentuan status tanggap darurat di daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		3. Masyarakat dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana selanjutnya atas dasar mekanisme penentuan status tanggap darurat tersebut	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		4. Dilakukannya rapat koordinasi penetapan status darurat bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
	54. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	1. Tersusunnya mekanisme prosedur yang mengatur tentang struktur komando tanggap darurat bencana di daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		2. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang sistem komando tanggap darurat bencana di daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		3. Sistem komando tanggap darurat diterapkan oleh seluruh SKPD sebagai acuan dalam operasi darurat di daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan – 6B)	(Lanjutan Aksi – 54)	4. Dilakukannya Operasi Keadaan Darurat	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		1. Ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Universitas	X	X	X	X	X
		2. Ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Universitas	X	X	X	X	X
		3. Adanya relawan dan personil terlatih telah melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Universitas	X	X	X	X	X
		4. Dilakukannya Operasi Keadaan Darurat	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
	55. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana	1. Ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Universitas	X	X	X	X	X
		2. Ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Universitas	X	X	X	X	X
		3. Adanya relawan dan personil terlatih telah melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Universitas	X	X	X	X	X
		4. Dilakukannya Operasi Keadaan Darurat	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		5. Adanya relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Universitas	X	X	X	X	X
		6. Adanya prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Universitas	X	X	X	X	X
		7. Adanya relawan dan personil terlatih telah melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Universitas	X	X	X	X	X
	56. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	1. Adanya relawan dan personil terlatih yang melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Tagana, PMI, Universitas	X	X	X	X	X
		2. Adanya prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Tagana, PMI, Universitas	X	X	X	X	X
		3. Tim penyelamatan dan pertolongan korban telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Tagana, PMI	X	X	X	X	X
		4. Adanya pengerahan personil cadangan TNI/Polri	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		5. Adanya operasional pemadam kebakaran	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		6. Dilakukannya Operasi Keadaan Darurat	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Tagana, PMI	X	X	X	X	X

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan – 6B)	57. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	1. Tersusunnya prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		2. Adanya aturan daerah (Surat Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau Peraturan Daerah) dalam penguatan prosedur perbaikan darurat bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		3. Adanya prosedur perbaikan darurat bencana telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		4. Dilakukannya perbaikan rumah warga dan sekolah darurat	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		5. Adanya Rumah sakit darurat	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
	58. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana	1. Adanya relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Universitas	X	X	X	X	X
		2. Adanya mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		3. Relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai prosedur	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Universitas	X	X	X	X	X
		4. Adanya distribusi logistik kebencanaan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		5. Adanya distribusi peralatan kebencanaan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
	59. Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana	1. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah) tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan – 6B)	(Lanjutan Aksi - 59)	2. Adanya prosedur yang mengatur mekanisme proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		3. Masyarakat memahami penentuan status tanggap darurat sebagai akhir dari masa tanggap darurat	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
		4. Dilakukannya rapat penghentian status tanggap darurat dan konfrensi pers	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dinkes	X	X	X	X	X
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	60. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	1. Adanya rancangan untuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana bagi sebagian ancaman bencana di daerah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos	X	X	X	X	X
		2. adanya kesepakatan secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah terhadap mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang telah disusun	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos	X	X	X	X	X
		3. Terakomodirnya seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di dalam rancangan pemulihan tersebut	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos	X	X	X	X	X
		4. Dilakukannya rekonstruksi pasca bencana di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PU, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	X	X	X	X	X
		5. Dilakukannya pemulihan kesehatan di wilayah pasca bencana dengan bekerjasama dengan instansi kesehatan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	X	X	X	X	X
	61. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	1. Tersusunnya ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos	X	X	X	X	X
		2. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos	X	X	X	X	X
		3. Disusunnya rancangan proses - proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana dengan dasar mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) guna menghindari risiko baru dari pembangunan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos	X	X	X	X	X

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan - 7)	(Lanjutan Aksi - 61)	4. Dilakukannya rekonstruksi pasca bencana di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	X	X	X	X	X
		62. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana						
		1. Adanya sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana? Baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos	X	X	X	X	X
		2. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos	X	X	X	X	X
		3. Tersusunya rancangan proses - proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (<i>slow onset</i>) dari pembangunan	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos	X	X	X	X	X
		4. Dilakukannya rehabilitasi pasca bencana di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	X	X	X	X	X
	63. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	1. Adanya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos	X	X	X	X	X
		2. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos	X	X	X	X	X
		3. Adanya rancangan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos	X	X	X	X	X
		4. Dilakukannya rekonstruksi pasca bencana di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	X	X	X	X	X
		5. Adanya Pelatihan Kegiatan Ekonomi (Kerajinan, Perikanan, Perkebunan, Koperasi dll)	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos	X	X	X	X	X
		6. Adanya dukungan kegiatan sosial (gotong royong, kerohanian, dll)	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos	X	X	X	X	X

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE- (Dalam Juta)				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Lanjutan Kegiatan - 7)	(Lanjutan Aksi - 63)	7. Adanya bantuan peralatan stimulan peningkatan sosial ekonomi masyarakat pasca bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Dunia Usaha dan Sektor Swasta	X	X	X	X	X
		8. Dilakukannya Gelar Budaya di Wilayah Pasca Bencana	Utama: BPBDPK Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos	X	X	X	X	X

KETERANGAN:

N/A: Not Available

(*) Indikator Evaluasi Terpilih

Untuk Aksi Nomor 53 Sampai 63 Mendapat Perlakuan Khusus Karena Harus Dievaluasi Setiap Tahunnya